

Judul : DPR Diminta Optimalkan Tenaga Ahli
Tanggal : Selasa, 01 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

DPR Diminta Optimalkan Tenaga Ahli

[JAKARTA] Peneliti Formappi Lucius Karus meminta DPR periode 2019-2024 mengoptimalkan peran tenaga ahli per anggota yang jumlahnya lima orang. Menurut Lucius, tenaga ahli harus lebih banyak bekerja daripada anggota DPR-nya dalam menyiapkan, menyusun, dan membahas hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi atau pembentukan UU.

"Maksimalkan tenaga ahli yang per anggota sampai 5 orang. Mereka yang mesti lebih banyak bekerja dari anggota DPR-nya. Maka rekrutmen tenaga ahli harus dikontrol, tidak diserahkan pada kebebasan anggota saja," ujar Lucius di Jakarta, Selasa (1/10).

Tenaga ahli yang direkrut, kata Lucius, harus benar-benar ahli dalam bidangnya karena akan membuat rancangan aturan yang menjadi panduan dalam masyarakat. Dia mengingatkan para anggota baru jangan sampai merekrut tenaga ahli hanya karena faktor kedekatan baik secara kekeluargaan, organisasi, atau partai politik.

"Tenaga ahli ini harus orang yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya

karena akan menentukan kualitas dari legislasi yang dihasilkan," tandas dia.

Selain mengoptimalkan tenaga ahli, menurut Lucius, ke depan, perlu mendorong partai politik untuk menempatkan anggota di alat kelengkapan sesuai dengan keahlian atau bidang yang diminati para anggota. Kemudian, kata dia, perlu memperkuat peran pimpinan DPR untuk melakukan koordinasi antara alat kelengkapan untuk menunjang perbaikan kinerja.

Lebih lanjut, Lucius berharap adanya pembenahan perencanaan dan tata kelola pembahasan legislasi. Menurut dia, rencana legislasi dalam prolegnas tak perlu banyak tetapi harus benar-benar mencari yang prioritas.

"Setiap usulan RUU harus sudah dilengkapi dengan naskah akademik dan draf sementara yang bisa diakses publik. Pembahasan tidak boleh dilakukan secara tertutup dan harus benar-benar melibatkan partisipasi publik. Harus bangun komunikasi publik yang efektif dan efisien dengan publik sehingga RUU yang dibahas bisa tersosialisasi dengan baik," katanya. [YUS/A-17]

Tekad Anggota DPR Termuda Lahirkan UU Prorakyat

[JAKARTA] Anggota DPR periode 2019-2024 diambil sumpahnya Selasa (1/10). Sidang Paripurna DPR perdana dipimpin anggota termuda dan tertua sebagaimana diatur UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Hillary Brigitta Lasut terpilih menjadi pimpinan sidang termuda. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut baru berusia 23 tahun. Hillary lahir di Manado, 22 Mei 1996.

Dia lolos menjadi wakil rakyat setelah meraih 70.345 suara pada Pileg 2019. Dunia politik seperti ini tak asing bagi putri pasangan Elly Engelbert Lasut dan Telly Tjantung tersebut. Elly merupakan bupati Kepulauan Talaud terpilih, sedangkan ibunya Telly tercatat pernah menjabat sebagai bupati Minahasa Tenggara.

Cita-cita Hillary menjadi wakil rakyat berawal ketika dirinya studi tur ke DPR di awal kuliah. Hillary merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Pelita Harapan (UPH). Gelar master diraihinya setelah menempuh pendidikan di Washington University.

Menjadi anggota DPR, Hillary bertekad untuk melahirkan produk hukum yang prorakyat. "Saya tertarik untuk membantu di bidang hukum dan sesuai dengan latar pendidikan saya.



Hillary Brigitta Lasut

Tentunya dalam hal menghadirkan produk hukum dengan anggota DPR lainnya, saya akan menyesuikannya dengan kepentingan rakyat," kata Hillary, saat dijumpai sebelum pelantikan, Selasa (1/10).

Hillary bakal mendorong undang-undang (UU) kejahatan siber. Seiring perkembangan zaman, menurut Hil-

lary, rakyat Indonesia membutuhkan perlindungan secara hukum terkait kegiatan di media sosial (medsos).

"Segala sesuatu saat ini, mulai dari status pribadi hingga perdagangan antarmasyarakat bahkan komunikasi dengan luar negeri bisa melalui media sosial. Rakyat Indonesia sebagai pengguna internet di era dunia siber dan Revolusi Industri 4.0 harus mendapat perlindungan oleh negara," tegas Hillary.

Disinggung mengenai kelemahan DPR dalam pembuatan UU, menurut Hillary, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hanya saja, seorang anggota DPR sepatutnya dapat senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Undang-undang yang dibuat DPR tidak boleh atas dasar kepentingan pribadi atau golongan. Pembuatan UU harus melalui prosedur yang seharusnya bukan 'by order' (pesanan) atau produk dadakan," ucap Hillary.

Hillary pun menyebut, "Saya akan ikut berjuang untuk membuat undang-undang sesuai kebutuhan dan kepentingan rakyat, kepentingan banyak orang di republik ini, kepentingan negara dan sesuai amanat UUD 1945." [C-6]